

RP 300 T KERUGIAN DARI TAMBANG ILEGAL

Potensi tambang di Indonesia sangat melimpah dan berpeluang untuk meningkatkan pendapatan negara hingga ratusan triliun rupiah. Sayangnya, di Indonesia masih marak aksi tambang ilegal yang juga berpotensi mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah juga. Presiden RI, Prabowo Subianto, pernah menyebut bahwa setidaknya ada 1.063 titik tambang ilegal. Senin (6/10/2025), Presiden mengungkapkan bahwa dari praktik ilegal lima perusahaan smelter di wilayah di wilayah Bangka Belitung (Babel) mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Tentunya, angka tersebut tidak termasuk tambang ilegal di daerah-daerah lainnya. Kelima Perusahaan smelter tersebut antara lain, PT Refined Bangka Tin (RBT); PT Stanindo Inti Perkasa (SIP); PT Sariwiguna Bina Sentosa (SB); CV Venus Inti Perkasa (VIP); dan PT Tinindo Inter Nusa (TIN). Di satu sisi, Presiden Prabowo juga mengungkapkan potensi pendapatan dari sektor tambang ini juga cukup besar. Bahkan, Presiden mengaku menemukan kandungan logam tanah jarang (LTJ) monasit sekitar 40.000 ton pada rangkaian penertiban tambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS). Menurut hitung-hitungan Presiden Prabowo, 1 ton monasit memiliki nilai pasar sekitar US\$200.000 atau sekitar Rp3,31 miliar dengan asumsi kurs Rp16.585 per dolar AS. Dengan demikian, potensi pendapatan negara dari 40.000 ton monasit yang diselamatkan dari tambang ilegal itu mencapai sekitar Rp132,68 triliun.

BACA HAL 11...



Lubang tambang timah di operasi PT Timah di Mentok, Pulau Bangka. (Bloomberg)

GANTI RUGI

AKIBAT TAMBANG ILEGAL

PT RBT ganti rugi kerusakan lingkungan
SEBESAR RP38,5 T

PT SB akan diminta tanggung jawab
SEBESAR RP23,6 T

PT SIP
SEBESAR RP24 T

CV VIP
SEBESAR RP42 T

PT TIN
SEBESAR RP23 T

TOTAL RP151,1 TRILIUN

PENGAMAT : PERTEMUAN PRABOWO DAN JOKOWI BAHAS ISU SENSITIF

Presiden RI, Prabowo Subianto, mendadak melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediaman pribadi Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025) lalu. Sejauh ini belum ada kabar secara spesifik mengenai isi perbincangan mereka.



Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Sabtu (4/10/2025). (Dokumentasi Informasi Sekretariat Presiden)

Analisis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, meyakini ada pembahasan isu-isu sensitif yang sedang mengemuka, termasuk membahas ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga kunjungan Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Jokowi. Ia menilai meskipun Prabowo dan Jokowi dikenal akrab, pertemuan kali ini terasa tidak biasa karena rangkaian kejadian politik sebelum dan sesudahnya.

Demo besar pada 28-31 Agustus 2025 yang menyeret nama Jokowi, reshuffle cabinet, hingga pernyataan Jokowi yang minta relawannya mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode, menjadi latar belakang yang membuat publik curiga.

"Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Ba'asyir ke rumahnya Pak Jokowi, terus meningkat eskalasi isu ijazah Gibran, jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo," kata pria yang akrab disapa Hensat dilansir rml, Senin (6/10/2025).

Hensat pun menyoroti pemanggilan dua menteri oleh Prabowo pasca pertemuan, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan

Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yulianto. Menurutnya, timing pemanggilan ini cukup membuat publik curiga mengingat isu ijazah Gibran yang kini bergulir dan kunjungan Ba'asyir yang bisa memicu kontroversi keamanan nasional.

"Kalau lihat kejadian-kejadiannya, menurut saya ada beberapa hal yang dibahas. Bisa saja tentang Abu Bakar, bisa saja tentang ijazah, bisa saja tentang reshuffle, atau dukungan Prabowo-Gibran dua periode," kata Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini.

Sementara itu, Peneliti pada Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Dominique Nicky Fahrizal mengatakan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo pada akhir pekan lalu bertujuan untuk menjaga konsolidasi kekuasaan.

Dia menilai salah satu tujuan dari konsolidasi kekuasaan tersebut adalah menjaga posisi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden. Pertemuan tersebut dapat diduga sebagai upaya agar Gibran dapat memiliki peran yang lebih besar dalam pemerintahan saat ini.

"[Selain itu], potensi pembicaraan kemungkinan besar mendiskusikan soal program pemerintah ke depan, termasuk IKN, soal percepatan

pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan iklim bisnis di Indonesia," ujar Nicky dilansir Bloomberg Technoz, Senin (6/10/2025).

Sekadar catatan, sudah ada usulan untuk pemakzulan Gibran sepanjang anak sulung Jokowi itu menjabat sebagai wakil presiden. Usulan itu disampaikan Forum Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan mengenai usulan tersebut. Belakangan, Gibran justru nampak menunjukkan sejumlah momen akrab dengan Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno -- salah satu tokoh yang menyokong Forum Purnawirawan TNI tersebut.

Senada, Peneliti Senior BRIN Lili Romli menilai salah satu topik yang mungkin dibahas dalam pertemuan Prabowo dan Jokowi adalah gempuran terhadap keluarganya, seperti persoalan ijazah dirinya, ijazah Gibran dan upaya pemakzulan anak sulungnya.

"[Jika benar demikian,] saya kira itu suatu yang tidak baik dan bukan pada tempatnya. Namun jika beberapa dugaan itu yang dibicarakan, bisa jadi publik akan kecewa dan itu bisa menggerus tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Prabowo,"

ujar dia.

Di sisi lain, kata Romli, bila Prabowo dan Jokowi justru berbicara mengenai masalah-masalah bangsa, maka itu merupakan hal yang baik. Lagipula, mantan Kepala Negara harus memberikan dukungan kepada Presiden yang sedang menjabat, tidak boleh mengganggu dan delegitimasi.

Sebelumnya, Ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, mengatakan pertemuan itu dilakukan sejak pukul 13.00 WIB. Dia mengatakan kurang lebih pertemuan berlangsung selama 2 jam.

"Dari jam 13.00, hampir 2 jam (bertemu)," ujarnya kala itu.

Namun, tak ada keterangan dari Syarif mengenai isi pertemuan Jokowi dan Prabowo. Usai bertemu Prabowo, kata dia, Jokowi langsung melanjutkan agendanya.

Sehari berselang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, menyampaikan isi pertemuan Jokowi dan Prabowo. Pras menyebut keduanya membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan.

"Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal," kata Pras kepada wartawan usai acara HUT ke-80 TNI, Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan pertemuan keduanya sebetulnya merupakan hal yang bisa. Hanya saja, lokasi pertemuan yang disesuaikan dengan posisi keduanya berada.

"Memang silaturahmi diantara dua pemimpin Presiden ke-7 dan Presiden ke-8. Kalau Pak Prabowo berkesempatan ke Jawa Tengah, beliau yang sowan atau mampir. Kebetulan Pak Presiden ke-7, Pak Jokowi ada di Jakarta. Sudah, janji ketemu waktunya makan siang," jelas dia.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai pertemuan ini sebagai tanda hubungan keduanya yang guyub. "Bagus kan kalau presiden dengan mantan presiden bertemu, pemimpin guyub," kata Luhut kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Luhut mengaku tidak mengetahui secara pasti isi pembicaraan keduanya. Namun menurutnya pertemuan itu baik dan dia meminta agar masyarakat mendoakan agar keduanya bisa terus kompak.

"Oh saya enggak tahu (isi pembicaraan). Tapi saya pikir mereka berdua kan pemimpin, pemimpin dan mantan pemimpin itu ada yang mereka bicarakan, jadi kita doakan semua kompak," ujar Luhut. (han,rls,ist/lut)



PERMOHONAN UJI SYARAT PENDIDIKAN CALON ANGGOTA DPR **DICABUT**

Dua orang pemohon gugatan terkait syarat pendidikan paling rendah SMA bagi calon anggota DPR/DPD mencabut permohonan mereka di Mahkamah Konstitusi kembali (MK). Sedianya, MK menggelar sidang pengujian Pasal 240 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) itu dilaksanakan Senin (6/10/2025).

Para pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) secara daring menyampaikan penarikan kembali permohonannya. Foto: Humas MK

Agenda sidang Perkara Nomor 162/PUU-XXIII/2025 adalah mendengarkan pokok-pokok perbaikan para Pemohon yaitu Nanda Yuniza Eviani sebagai pemohon I dan Muhammad Rafli Nur Rahman sebagai pemohon II. Namun, Nanda Yuniza mengatakan bahwa pihaknya melakukan pencabutan permohonan dengan alasan yang telah dipertimbangkan dengan kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

"Mohon izin per hari ini memohonkan pencabutan permohonan dengan alasan seiring dengan penelaahan lebih lanjut terhadap substansi norma yang diuji serta memperhatikan aspek legal standing," katanya seperti dalam keterangan yang diterima Senin (6/10/2025).

Dalam keterangan itu juga menjelaskan bahwa pemohon dalam perkara a quo berkesimpulan bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap konstruksi permohonan yang dimaksud. Kontruksi tersebut khususnya melalui penambahan pemohon baru yang memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dan relevan dengan objek permohonan pengujian.

Dia menandakan, demi menjaga kemurnian proses peradilan dan menghindari potensi formil yang dapat melemahkan pokok permohonan, maka pemohon mencabutnya. Pencabutan dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan secara suka rela.

"Dengan niat mengajukan permohonan baru yang akan diperbaiki dan disusun ulang dengan subjek pemohon yang lebih representatif," jelas Nanda Yuniza kepada Sidang Panel yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan dua hakim anggota yakni Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani, Senin (6/10/2025).

Dalam sidang perdana di MK pada Senin (22/9/2025) lalu, Muhammad Rafli Nur Rahman mempermasalahkan pendidikan minimal SMA bagi calon anggota DPR/DPD. Menurutnya, norma yang hanya mensyaratkan pendidikan paling rendah SMA jelas tidak sepadan dengan kewenangan konstitusional lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

Dia menyebut, syarat pendidikan yang terlalu rendah tersebut tidak menjamin adanya kapasitas intelektual, kemampuan analitis,

maupun kualitas legislasi yang memadai. Akibatnya, fungsi legislasi yang seharusnya melahirkan regulasi yang responsif, visioner, dan berpihak pada rakyat justru berpotensi menghasilkan produk hukum yang lemah, tumpang tindih, diskriminatif, dan abai terhadap kebutuhan masyarakat.

"Bila syarat legislator hanya dengan ijazah SMA, profesi yang hanya menafsirkan undang-undang seperti hakim, jaksa, advokat, wajib bergelar sarjana, sedangkan masuk akalkah jika pembentuk undang-undang justru cukup dengan lulusan sekolah menengah. Jika dibiarkan martabat Pasal 20 ayat (1) direndahkan, bahkan direduksi oleh ambang yang minimalis," tegas Nanda Yuniza Eviani.

Karenanya, para Pemohon merasakan keresahan mendalam akibat maraknya produk legislasi DPR/DPD yang bermasalah dan berulang kali dibatalkan oleh MK. Kondisi ini bukan sekadar kelemahan teknis, melainkan bukti nyata bahwa rakyat, termasuk para Pemohon, dipaksa hidup di bawah bayang-bayang undang-undang yang rapuh, tidak konsisten, dan gagal memberikan perlindungan.

Hal ini mengakibatkan hak-hak dasar yang dijamin UUD 1945, seperti hak atas pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, lingkungan hidup yang baik, dan kesejahteraan sosial yang adil, justru terabaikan. Norma Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu, yang hanya mensyaratkan pendidikan minimal SMA bagi calon anggota DPR/DPD menjadi pangkal persoalan dalam hal turunnya standar parlemen menjadi sekadar arena popularitas dan transaksi politik, bukan ruang intelektualitas dan integritas.

Untuk itu, para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai Pasal 240 huruf e "berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat".

Sebelumnya, MK menolak gugatan terkait syarat pendidikan minimal calon presiden serta calon anggota legislatif dalam UU Pemilu dan calon kepala daerah dalam UU Pilkada. Hakim MK menolak mengubah syarat pendidikan minimum dalam kedua UU itu.

"Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua hakim MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan 154/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, Senin (29/9/2025).

Hakim MK menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma berkenaan dengan persyaratan pendidikan calon presiden, anggota legislatif dalam UU Pemilu dan syarat calon kepala daerah yang diatur dalam Pasal 182 huruf e dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Hakim MK menilai dalil permohonan pemohon yang meminta syarat pendidikan itu diubah menjadi sarjana tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r, Pas 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum," ujar hakim MK Ridwan Mansyur. (rls,ist,han/lut)



Menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana diatur dalam norma Pasal 169 huruf r, Pas 182 huruf e, dan Pasal 240 ayat (1) huruf e UU 7/2017 juncto Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,"

**Ridwan
Mansyur**
hakim MK

Data itu merupakan tindak lanjut temuan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Gudang Bulog Ternate pada 23 September 2025. Bapanas langsung menggelar rapat koordinasi pada 2 Oktober 2025 untuk mengevaluasi kualitas beras Bulog.

"Sebanyak 29,99 ribu ton beras, yang terdiri dari 3 ribu ton beras dalam negeri dan 26,89 ribu ton beras luar negeri tergolong telah turun mutu," ungkap Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas Nita Yulianis pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, disiarkan YouTube Kemendagri, Senin (6/10/2025).

"Beras yang mengalami turun mutu akan dilakukan reprocessing dalam rangka memperbaiki mutu beras tersebut ketika akan disalurkan," sambungnya.

Bapanas juga mengungkapkan ada 1,45 juta ton beras pemerintah menumpuk di gudang Perum Bulog selama lebih dari enam bulan. Nita mengatakan jumlah tersebut setara dengan 37,95 persen total stok beras saat ini.

Berdasarkan hasil rapat evaluasi Bapanas, cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Bulog sekarang ini mencapai 3,84 juta ton.

"Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensori dan keamanan pangan," ucapnya.

Inspeksi Komisi IV DPR RI sebelumnya mendapati 1.200 ton beras lokal tersimpan sejak Mei 2024. Sebagian beras sudah berubah warna menjadi abu-abu, sedangkan stok beras impor masih dalam kondisi baik.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani tak membantah temuan Titiek Soeharto itu. Ia mengamini 1.200 ton beras di Gudang Bulog Tabahawa, Maluku Utara turun kualitas. Kendati demikian, ia memastikan Bulog akan memperbaiki kualitas beras-beras tersebut.

"Ada, betul (1.200 ton beras turun kualitas). Sekarang sedang di-processing ulang. Kita ada proses ulang, pengolahan ulang supaya layak dikonsumsi," kata Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/9/2026).

Rizal menuturkan proses pengolahan ulang demi memperbaiki kualitas beras sebelum disalurkan ke masyarakat. Penyaluran beras itu nantinya mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga Bantuan Pangan (Banpang).

Pengamat Soroti Harga Melonjak

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan Perum Bulog menyerap seluruh jenis Gabah Kering Panen (GKP) tanpa mempertimbangkan mutu sejak awal 2025 dinilai justru

CEMAS KUALITAS BERAS BULOG

29 Ribu Ton Turun Mutu, 1,45 Juta Ton Numpuk di Gudang

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap lebih dari 29 ribu ton beras pemerintah yang disimpan di gudang Perum Bulog mengalami turun mutu. Tak hanya itu, ada 1,45 juta ton beras pemerintah yang menumpuk di gudang selama lebih dari enam bulan. Walhasil, kualitasnya pun dikhawatirkan juga anjlok.



(Ilustrasi) Ada 1,45 juta ton beras pemerintah yang menumpuk di gudang selama lebih dari enam bulan. (Dok)

menimbulkan masalah baru. Alih-alih memperkuat cadangan pangan, langkah ini membuat Bulog kesulitan mengelola gabah rendah kualitas dalam jumlah besar sehingga berimbas pada kenaikan harga beras dan penurunan mutu.

Pengamat pertanian Khudori menyebut kebijakan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14/2025 serta Inpres Nomor 6/2025

tersebut merupakan langkah berani, bahkan cenderung nekat, karena belum pernah dilakukan sejak Bulog berdiri pada 1967. Menurutnya, hingga 20 September 2025, total gabah yang diserap Bulog mencapai 4,23 juta ton, namun hanya 34,47 persen yang memenuhi standar kualitas. Sementara sisanya, sekitar 65,53 persen, masuk kategori gabah bermutu rendah. (wid,rls,ant/dya)

Realisasi SPHP:

Beras Baru 30%, Jagung Hanya 3%

PERUM Bulog membeberkan realisasi penyaluran cadangan beras dan jagung pemerintah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang kini masing-masing baru capai 30,93 persen dan 3 persen per 5 Oktober 2025.

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari mengatakan saat ini Perum Bulog tengah berupaya mempercepat realisasi penyaluran SPHP beras.

"Kami sampaikan bahwa sampai dengan hari kemarin, total realisasi SPHP dalam 463.000 ton atau 30 persen dari pagu kita 1,5 juta ton dan ini kita lakukan setiap hari di seluruh Indonesia. Dalam tujuh hari terakhir ini rata-rata mencapai sekitar 7.000 ton," tutur Epi dalam Rakor Inflasi, Senin (6/10/2025).

Secara terperinci, program SPHP beras pada 2025 yang akan dikerjakan Perum Bulog melalui

penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki target salur 1,5 juta ton. Ini terdiri dari 181 ribu ton yang disalurkan pada Januari-Maret 2025 dan 1,318 juta ton ditargetkan akan disalurkan selama Juli sampai Desember 2025.

Dia juga menuturkan, saat ini posisi cadangan beras nasional berada di angka 3.905.586 ton atau 3,9 juta ton, terdiri 3,86 juta ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 41,12 ribu ton berupa cadangan stok beras komersial.

Kemudian untuk SPHP jagung yang telah disalurkan ke peternak saat ini telah capai 1.611 ton dari pagu 50,38 ribu ton hingga awal Desember 2025.

Angka ini setara dengan 3 persen dari pagu tersebut, dengan demikian masih ada 50,77 ribu ton pagu yang belum disalurkan oleh Perum Bulog sebagai perusahaan pelat merah yang mendapatkan penugasan merealisasikan program SPHP

REALISASI PROGRAM SPHP (STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN)

Per 5 Oktober 2025:

SPHP Beras: Terealisasi 30,93% atau 463.000 ton dari target 1,5 juta ton.

SPHP Jagung: Baru 3% atau 1.611 ton dari target 50,38 ribu ton.

SPHP BERAS

○ Target 2025: 1,5 juta ton, terdiri dari:

- 181 ribu ton (Januari-Maret 2025)
- 1,318 juta ton (Juli-Desember 2025)

○ Rata-rata penyaluran: Sekitar 7.000 ton per hari.

○ CADANGAN BERAS NASIONAL:

- Total 3,9 juta ton, terdiri dari:
 - 3,86 juta ton CBP (Cadangan Beras Pemerintah)
 - 41,12 ribu ton stok beras komersial
 - Sisa target penyaluran: Sekitar 1 juta ton hingga akhir 2025.

SPHP JAGUNG

○ Realisasi:

- 1.611 ton dari pagu 50,38 ribu ton (baru 3%).

○ Wilayah distribusi utama:

- Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur.

○ Cadangan Jagung Pemerintah (CJP):

- Tersedia 74.820 ton di gudang Bulog.

○ Sisa pagu belum tersalurkan:

- Sekitar 50,77 ribu ton.



Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) ini.

"Sampai dengan dalam tiga hari terakhir ini, kami telah merealisasikan sebanyak 1.611 ton jumlah cadangan jagung pemerintah melalui program SPHP jagung, terutama di kawasan Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, ini merupakan sentra-sentra dari peternak jagung mandiri," jelas Epi.

Sementara kondisi stok CJP, lanjut Epi kini berada di angka 74.820 ton yang tersedia di gudang Bulog. Dia memastikan realisasi penyaluran SPHP jagung akan terus bertambah setiap harinya. (wid,rls,kum/dya)

FAKTA! 99% BANGUNAN PESANTREN DI INDONESIA TAK KANTONGI IZIN RESMI

Runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin (29/9/2025) mengungkap fakta mengejutkan terkait keamanan dan legalitas gedung pesantren di Indonesia. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa hampir seluruh ponpes di Tanah Air belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin wajib untuk mendirikan atau merenovasi bangunan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa dari sekitar 34 ribu pondok pesantren di Indonesia, hanya sekitar 50 ponpes yang memiliki izin resmi tersebut. Angka itu berarti hanya 0,15 persen bangunan pesantren yang legal secara administrasi, sementara 99,85 persen lainnya belum memiliki izin PBG.

“Dari seluruh Indonesia, hanya ada 50 pondok pesantren yang sudah punya izin bangunan. Selebihnya belum,” ujar Dody dalam keterangannya dikutip Senin (6/10/2025).

Ia menegaskan pentingnya kepemilikan PBG untuk menjamin keamanan konstruksi agar tragedi seperti di Sidoarjo tak terulang. PBG sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum berganti nama pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 16 Tahun 2021.

Dody menambahkan, pemerintah akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agama (Kemendagri) untuk mempercepat penerbitan izin tersebut di seluruh pesantren. “Semua ponpes seharusnya memiliki PBG. Kami akan duduk bersama Menag dan Mendagri agar sosialisasi dan penertiban bisa segera dilakukan,” katanya.

Untuk saat ini, Kementerian PU masih fokus pada penanganan darurat di lokasi musibah Ponpes Al Khoziny. Setelah situasi stabil, pemerintah akan melakukan audit dan mendorong penerapan sertifikasi laik fungsi bangunan bagi pondok-pondok pesantren.

Dody juga menegaskan, pembangunan ulang musala Ponpes Al Khoziny wajib mengantongi izin PBG dari pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan pembangunan memang berada di bawah kewenangan pemda, sementara Kementerian PU hanya menyiapkan sistem dan perangkat regulasinya.

“Kalau mau membangun kembali, wajib punya PBG. Pengelolaannya di pemerintah daerah masing-masing, kami hanya menyiapkan sistemnya,” jelasnya.

Pihak Kementerian PU juga telah mengirim tim dari Direktorat Jenderal



Petugas membawa peti jenazah korban runtuhnya gedung pesantren Al Khoziny Sidoarjo, Jawa Timur. (AFP)

Cipta Karya untuk memeriksa struktur bangunan dan memastikan proses pembangunan kembali nanti sesuai standar keselamatan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan akan

menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pesantren di Indonesia. Hal ini memastikan keamanan dan kelayakan bangunan.

“Saya akan meninjau secara langsung kondisi fisik bangunan

Korban Meninggal Ambruknya Ponpes Sidoarjo Jadi 63, Termasuk 6 Potongan Tubuh

Tim gabungan terus mempercepat proses pencarian korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Memasuki hari kedelapan pencarian, hingga Senin (6/10/2025) sore, jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 63 orang, dengan enam di antaranya berupa potongan tubuh.

menyampaikan bahwa dalam sehari terakhir, tim berhasil mengevakuasi 10 jenazah dan satu potongan tubuh dari area reruntuhan sisi belakang pesantren.

“Total hari ini ada 10 korban dan 1 potongan tubuh yang berhasil dievakuasi dari sektor A2 dan A3,” ujar Emi Freezer.

Seluruh jenazah langsung dibawa ke RS Bhayangkara Surabaya untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polda

Jawa Timur.

Proses pembersihan puing kini difokuskan di bagian utara bangunan yang tidak menyatu dengan struktur utama. Hingga pukul 17.39 WIB, total korban yang berhasil ditemukan mencapai 167 orang — terdiri atas 104 orang selamat dan 63 meninggal dunia.

Sementara itu, jumlah korban yang masih belum ditemukan belum dapat dipastikan karena enam potongan tubuh yang ditemukan masih menunggu hasil identifikasi untuk memastikan apakah berasal dari korban yang sama atau berbeda.

Insiden tragis ini terjadi pada Senin (29/9) sore, ketika gedung tiga lantai yang juga berfungsi sebagai musala di asrama putra Pondok Pesantren Al Khoziny mendadak roboh. Saat kejadian, ratusan santri

pondok pesantren dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya agar tidak ada lagi peristiwa serupa yang menelan korban jiwa,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Ia menuturkan, arahan Presiden Prabowo tersebut menekankan pentingnya jaminan keselamatan dan kenyamanan bagi para santri dalam proses belajar mengajar di pesantren. Menurutnya, lingkungan belajar yang aman akan membantu melahirkan generasi santri yang berkualitas dan berdaya saing.

“Presiden berpesan agar setiap anak bangsa yang menimba ilmu di pesantren dijaga keselamatannya. Pondok pesantren adalah pelopor pemberdayaan masyarakat, maka keamanan para santri menjadi hal yang wajib dijamin,” kata Cak Imin. (wid,istant/dya)

KORBAN TEWAS SUDAH TERIDENTIFIKASI DALAM TRAGEDI PONPES AL KHOZINY, SIDOARJO

- **Mochammad Mashudulhaq (14)**, Surabaya
- **Muhammad Soleh (22)**, Tanjung Paden, Belitung
- **Maulana Alfian Ibrahimovic (13)**, Surabaya
- **Rafi Catur Okta Mulya (17)**, Surabaya
- **Moch. Agus Ubaidillah (14)**, Surabaya
- **Firman Noor (16)**, Surabaya
- **Muhammad Azka Ibadurrahman (13)**, Surabaya
- **Daul Milal (15)**, Surabaya
- **Ahmad Rijalul Haq (16)**, Surabaya
- **Nuruddin (13)**, Bangkalan

KETERANGAN:

Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia mencapai 63 orang, termasuk enam potongan tubuh yang masih dalam proses identifikasi. Sementara itu, total korban yang berhasil ditemukan sebanyak 167 orang, terdiri dari 104 selamat dan 63 meninggal dunia.

tengah melaksanakan salat Ashar berjemaah di bangunan yang masih dalam proses pembangunan tersebut.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratomoko, meminta agar insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, diusut secara menyeluruh. Ia menilai peristiwa yang menelan banyak korban jiwa di lingkungan pendidikan itu harus ditelusuri baik dari sisi teknis konstruksi maupun aspek hukumnya. (wid,guh,rls/dya)

Petani Kabupaten Malang Beralih Tanam Jeruk, DTPHP: Penghasil Tertinggi di Jatim

MALANG - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang mengungkap tren peralihan para petani ke komoditas jeruk dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena hijrah ke komoditas jeruk itu bahkan disebut menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah dengan penghasil jeruk tertinggi di Jawa Timur. Melampaui daerah sentra buah lainnya di provinsi ini.

"Industri jeruk di Kabupaten Malang ini sedang luar biasa naiknya. Menjadi penghasil jeruk terbesar di Jawa Timur. Tadinya kan Banyuwangi, sekarang Kabupaten Malang," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica, Senin (6/10/2025).

Avicenna mengatakan, peningkatan produksi jeruk di wilayahnya tidak lepas dari kondisi geografis dan cuaca yang mendukung. Disebutkannya, tanah di Kabupaten Malang tergolong subur dengan curah hujan yang relatif stabil, sehingga cocok untuk budidaya tanaman jeruk.

Lebih lanjut, Avicenna menuturkan, dari sisi ekonomi, budidaya

jeruk kini dianggap lebih menguntungkan dan stabil dibanding tanaman hortikultura lainnya.

"Info yang kami dapat, komoditas yang paling stabil harganya, itu adalah jeruk untuk sekarang. Petani baru juga banyak yang menanam jeruk sekarang. Petani apel di Poncokusumo, banyak beralih ke jeruk. Petani hortikultura yang lain juga banyak yang menanam jeruk. Terutama di wilayah lahan-lahan kering itu," ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, produksi jeruk di wilayah tersebut menunjukkan peningkatan sepanjang 2024.

Tercatat, total produksi jeruk mencapai 3.768.134 kwintal yang tersebar di 30 kecamatan. Angka tersebut naik dibandingkan tahun sebelumnya, di mana produksi jeruk pada 2023 berada di kisaran 3.531.485 kwintal.

Sementara itu, tren berbanding terbalik terjadi pada produksi apel. Jika pada 2023 total produksi apel mencapai 953.569 kwintal. BPS mencatat, pada tahun 2024 jumlah produksi pertanian apel menurun menjadi 875.023 kwintal.

Di sisi lain, perubahan arah

pertanian ini juga telah dirasakan langsung oleh para petani. Salah satunya Suyono, petani jeruk di Dusun Lo'andeng, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau. Ia mengaku mulai menanam jeruk sejak 2017 setelah sebelumnya menanam tebu.

"Tetapi karena karena penghasilan tebu 1 tahun sekali makanya ganti ke jeruk. Apalagi tanahnya cocok untuk bertanam buah jeruk dan penghasilannya (uangnya) juga lebih banyak jeruk," kata Suyono.

Ditambahkannya, panen dilakukan setiap delapan bulan sekali dan hasil produksinya terus meningkat. Namun, ia menyebut tantangan utama dalam budidaya jeruk adalah kondisi kemarau panjang dan serangan hama lalat buah.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, menurutnya petani harus rutin menyiram dan melakukan pengendalian hama secara teratur. "Saya jualnya ke pengepul, langsung



Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, Avicenna Medisica. (Santi/Lentera)

dibawa ke kelas supermarket," terangnya.

Sementara itu, Irfan Adiansyah, petani jeruk milenial dari Desa Selorejo, Kecamatan Dau, menyebut harga jeruk saat ini cenderung stabil, meski tidak setinggi beberapa tahun sebelumnya. Ia menilai cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan utama dalam menjaga produktivitas tanaman. (Santi/Dya)

Ada Sekitar 2.191 Masjid hingga Musala, Pemkot Malang Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf



Kepala Bagian Kesra Setda Kota Malang, Achmad Sholeh. (Santi/Lentera)

kemudian hari.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Malang, Achmad Sholeh, menyampaikan percepatan sertifikasi dilakukan agar setiap tempat ibadah memiliki legalitas yang jelas, baik dari sisi pewakafan maupun perizinan bangunannya.

"Di Kota Malang ini ada 1.200 musala, 900 masjid, 91 pondok pesantren, dan madrasah. Pemkot Malang terus mendorong agar semua diurus izin-izinnya

tentang pewakafan, sehingga aman dan di kemudian hari tidak ada masalah," ujar Sholeh, ditemui usai menerima kunjungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang di Balai Kota Malang, Senin (6/10/2025).

Dijelaskannya, Pemkot Malang tidak hanya mendorong pengurusan izin wakaf, tetapi juga memberikan pendampingan dalam proses sertifikasi.

"Pemkot Malang pernah membantu melalui Dimasindo senilai Rp1,8 miliar, agar masjid-masjid di Kota Malang bisa tersertifikasi. Karena di antara yang memberatkan masjid-masjid itu kan bayar BPHTB juga," katanya.

Sholeh mengatakan, selain pendampingan administrasi, Pemkot Malang juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang, mengumpulkan para lurah, camat, serta perwakilan pengurus masjid dan musala untuk mempercepat proses sertifikasi.

Langkah koordinatif ini dilakukan agar setiap wilayah memiliki data yang jelas terkait status tanah wakaf, sekaligus mempercepat verifikasi di lapangan. "Kami dorong terus. Makanya sampai dikumpulkan lurah

dan camat, kemudian perwakilan masjid musala, itu untuk mempercepat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sholeh menyebutkan berdasarkan data sebaran wakaf Kota Malang tahun 2025, mushola mendominasi peruntukan tanah wakaf dengan 605 lokasi atau sekitar 59,8 persen dari total keseluruhan aset wakaf di daerah tersebut.

Sementara itu, masjid menempati posisi kedua dengan 259 lokasi (25,6 persen). Selanjutnya, sekolah tercatat sebanyak 86 lokasi (8,5 persen), diikuti pesantren dan makam masing-masing sebanyak 20 lokasi (2,0 persen).

"Adapun fasilitas sosial lainnya mencakup 22 lokasi (2,2 persen) yang meliputi berbagai sarana untuk kepentingan umum," katanya.

Dari sisi luas lahan, lanjut Sholeh, kategori masjid memiliki total 81.943,07 meter persegi (32,4 persen), menjadi yang terbesar di antara aset wakaf lainnya. (Santi/Dya)

TRUMP TETAPKAN CHICAGO SEBAGAI ZONA PERANG

Kota Chicago, yang merupakan kota terbesar ketiga di Amerika Serikat, resmi ditetapkan sebagai zona perang pada Minggu (5/10/2025). Penetapan ini memberi wewenang kepada pemerintahan Presiden Donald Trump untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional ke wilayah tersebut.

Garda Nasional merupakan pasukan cadangan militer Amerika Serikat yang terdiri dari warga sipil dengan pelatihan militer. Pasukan ini berada di bawah kewenangan gubernur untuk menjalankan tugas dalam negeri, seperti penanganan bencana atau keadaan darurat di tingkat negara bagian, namun dapat pula diaktifkan oleh presiden untuk melaksanakan operasi militer federal, termasuk di luar negeri.

Chicago saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat, yang dikenal sebagai lawan politik Trump. Upaya Presiden Trump untuk mengerahkan Garda Nasional di wilayah yang dipimpin Demokrat ini sempat diblokir oleh beberapa hakim di Amerika Serikat.

Penetapan status Chicago sebagai zona perang terjadi bersamaan dengan meningkatnya krisis politik di AS, yang dipicu oleh langkah tegas Trump dalam kebijakan anti-kejahatan dan anti-imigran. Partai Demokrat menilai tindakan tersebut sebagai bentuk sikap otoriter dari pemerintahan Trump.

Meski menuai pro dan kontra, pada Sabtu pekan lalu Trump menyetujui pengiriman 300 personel Garda Nasional ke Chicago, meskipun Gubernur Illinois, J.B. Pritzker, secara tegas menolak kehadiran pasukan cadangan tersebut di kota itu.

Pada Minggu (5/10/2025), Menteri Keamanan Dalam Negeri Kriti Noem mendukung penuh keputusan Trump dan bahkan mengumumkan Chicago sebagai zona perang.

Menanggapi hal tersebut, Pritzker menuduh adanya motif tersembunyi di balik penetapan status zona perang untuk Chicago, yang berada di wilayah Illinois.

"Partai Republik bertujuan untuk menebar kekacauan di lapangan. Mereka ingin menciptakan zona perang, agar mereka dapat mengirim

lebih banyak pasukan," ujar Pritzker seperti dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

"Mereka harus segera keluar," sambung dia.

Penetapan status Chicago dilakukan setelah pekan lalu Trump menyampaikan pernyataan mengenai kemungkinan penggunaan militer untuk menghadapi potensi konflik internal di Amerika Serikat.

Trump bahkan menuduh salah satu kota di AS, yakni Portland, sebagai



Anggota Garda Nasional. (Foto: Reuters)

pusat pemberontakan, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim tersebut.

Sementara itu, beberapa hari terakhir, ketegangan meningkat di Chicago akibat operasi penggerebekan oleh Imigrasi AS (ICE). Insiden kekerasan terjadi pada Sabtu lalu setelah petugas federal menembak seorang pengendara

motor di kota tersebut.

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keamanan Dalam Negeri, pengendara itu dilaporkan bersenjata dan mencoba menabrak salah satu kendaraan patroli federal. (Reuters, ist/nei)

Sejarah Shutdown Pemerintah AS

Tahun	Durasi Shutdown	Pegawai Terdampak
1976	10 hari	10.000
1977	12 hari	17.000
1980	2-11 hari (parsial)	250.000
1981	2 hari	250.000
1983	3 hari	80.000
1995-1996	21 hari	800.000
2013	16 hari	800.000
2018-2019	35 hari	800.000
2025	Mulai 1 Oktober	750.000

PHK Massal Mengancam PNS AS

PEMERINTAH Amerika Serikat (AS) berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal apabila Presiden Donald Trump menilai negosiasi dengan Partai Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan tidak mencapai kesepakatan.

Memasuki hari kelima penutupan, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan masih ada kemungkinan Partai Demokrat akan mengalah agar penutupan pemerintah dapat diakhiri dan ancaman PHK massal bisa dihindari.

"Presiden Trump dan Russ Vought (Direktur Anggaran Gedung Putih) sedang menyiapkan langkah-langkah dan bersiap bertindak jika memang harus, tapi mereka berharap itu tidak terjadi," ujar Hassett, dikutip dari Reuters, Senin (6/10/2025).

Pada Minggu lalu, Trump mendapat pertanyaan mengenai kapan pemerintahannya akan memulai pemberhentian pegawai

federal. Ia memberikan jawaban singkat tanpa disertai penjelasan tambahan.

"Ini sedang berlangsung sekarang," singkatnya

Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih juga belum memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Lembaga itu dikenal sebagai penggerak utama dalam upaya Trump untuk secara signifikan mengurangi ukuran pemerintahan federal.

Belum Ada Negosiasi

Belum terlihat adanya perkembangan nyata dalam negosiasi antara para pemimpin Kongres sejak pertemuan terakhir mereka dengan Trump pekan lalu. Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober, bertepatan dengan awal tahun fiskal federal 2026, setelah Partai Demokrat di Senat menolak rancangan pendanaan sementara yang seharusnya menjaga lembaga federal tetap beroperasi hingga 21 November.

"Mereka menolak berbicara dengan kami," kata pemimpin

Demokrat di Senat, Chuck Schumer. Ia menambahkan bahwa kebuntuan ini hanya bisa diselesaikan melalui pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan empat pemimpin Kongres.

Partai Demokrat menuntut adanya perpanjangan permanen terhadap peningkatan kredit pajak premi yang membantu warga Amerika Serikat membeli asuransi kesehatan swasta melalui program Affordable Care Act. Mereka juga meminta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan membatalkan anggaran yang telah disepakati secara sepihak dalam kesepakatan apa pun.

Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune, menyatakan kesiapannya untuk menanggapi tuntutan tersebut, namun menegaskan bahwa Partai Demokrat harus terlebih dahulu menyetujui pembukaan kembali pemerintahan federal. (Reuters, ist/nei)

Jarang Ganti Bantal? Ini Bahayanya Bagi Kesehatan

Masih banyak orang yang belum menyadari bahwa bantal ternyata memiliki masa kedaluwarsa. Jika digunakan terlalu lama, bantal dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk masalah pada sistem pernapasan.

Menurut laporan Hindustan Times pada Minggu (5/10/2025), ahli bedah ortopedi sekaligus pendidik kesehatan dan pendiri NutriByte Wellness, Dr. Manan Vora, menjelaskan bahwa hal tersebut wajar terjadi. Ia menekankan bahwa bantal memiliki batas waktu pemakaian karena setiap hari bersentuhan langsung dengan wajah dan mulut selama delapan hingga sepuluh jam saat seseorang tidur.

Ia menjelaskan bahwa saat seseorang tidur, bantal menjadi tempat berkumpulnya berbagai kotoran dan mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata. Setiap malam, tubuh manusia secara alami melepaskan sel-sel kulit mati, mengeluarkan air liur, serta menghasilkan minyak dan sekresi dari wajah dan rambut.

Semua zat ini secara perlahan terserap ke dalam permukaan bantal, menciptakan lingkungan yang lembap dan hangat—kondisi ideal bagi pertumbuhan tungau debu, jamur, dan bakteri. Seiring waktu, kotoran yang menumpuk tersebut dapat menyebabkan bantal menjadi sarang mikroorganisme penyebab alergi, jerawat, serta iritasi kulit.

Lebih lanjut, akumulasi debu dan tungau pada bantal yang jarang dibersihkan juga dapat memicu gangguan pernapasan, terutama bagi orang dengan sensitivitas tinggi seperti penderita asma atau alergi. Menurut ahli, hal ini bukan hanya berdampak pada kenyamanan tidur, tetapi juga pada kualitas kesehatan

secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan untuk rutin mencuci atau mengganti bantal dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan bahan pembuatnya. Kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga kebersihan, mengurangi risiko infeksi kulit dan saluran pernapasan, serta meningkatkan kualitas tidur yang lebih sehat. "Banyak bantal terbuat dari bahan sintetis seperti busa poliuretan dan seiring waktu, bahan-bahan tersebut dapat terurai dan melepaskan senyawa organik," jelasnya.

Penyebab

Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal dapat menyebabkan komplikasi kulit seperti:

Jerawat

Bantal kotor mengandung bakteri, minyak, dan sel kulit mati yang dapat menyumbat pori-pori wajah. Akibatnya, timbul jerawat, komedo, hingga peradangan kulit.

Alergi

Penumpukan tungau debu dan partikel halus pada bantal dapat memicu reaksi alergi pada sebagian orang, ditandai dengan gejala seperti hidung tersumbat, bersin berulang, mata berair, dan rasa tidak nyaman di area wajah saat tidur.

Iritasi Kulit

Gesekan dengan permukaan bantal yang kotor dan berdebu dapat memicu reaksi pada kulit berupa rasa gatal,

kemerahan, serta iritasi ringan hingga sedang, terutama bagi orang yang memiliki kulit sensitif atau alergi terhadap debu dan kotoran.

Gangguan Pernapasan

Menghirup debu atau spora jamur dari bantal yang jarang dibersihkan dapat memicu batuk, sesak napas, serta memperparah gejala asma, terutama pada orang yang sensitif terhadap debu dan alergen.

Infeksi Paru-paru Serius (kasus jarang)

Jika paparan terhadap bantal kotor berlangsung lama, mikroorganisme berbahaya bisa masuk ke saluran pernapasan dan memicu infeksi paru-paru yang serius atau bahkan fatal. "Jika seseorang terpapar bantal kotor dalam jangka waktu yang lama, mereka dapat terkena infeksi paru-paru yang fatal," katanya.

Menurut Vora, daya tahan bantal sangat dipengaruhi oleh bahan pembuatnya. Bantal berbahan poliester umumnya bertahan antara enam bulan hingga dua tahun, sedangkan bantal berbahan bulu dapat digunakan selama satu hingga tiga tahun.

Sementara itu, bantal memory foam memiliki masa pakai sekitar dua hingga tiga tahun, bantal lateks sedikit lebih awet dengan usia tiga hingga empat tahun, dan bantal buckwheat menjadi yang paling tahan lama, yakni berkisar antara tiga hingga lima tahun.

Vora menekankan bahwa bantal memiliki kedekatan yang lebih intens dengan pengguna dibandingkan perangkat lain, sehingga penting untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menggantinya demi menjaga kualitas tidur dan kebersihan. (nei,ist/dya)

Bantal Lateks

Kelebihan :

Cocok untuk penderita masalah tulang leher/punggung, bebas tungau, tahan lama

Kekurangan :

Lebih keras, harga relatif mahal

Bantal Bulu Angsa

Kelebihan :

Nyaman digunakan, kualitas tinggi jika menggunakan bulu halus

Kekurangan :

Menyimpan debu & tungau, tidak cocok untuk penderita alergi, mahal

Bantal Busa

Kelebihan :

Lebih bersih dari bantal bulu angsa, mudah dibersihkan

Kekurangan :

Terasa panas saat digunakan

Bantal Kapuk

Kelebihan :

Mudah ditemukan, bahan alami

Kekurangan :

Menjadi sarang tungau & debu, dapat memicu asma, perlu sering dijemur

Bantal Memory Foam

Kelebihan :

Menyerap keringat, menopang leher dengan baik, nyaman digunakan

Kekurangan :

Agak berat dan perlu waktu lama untuk kembali ke bentuk semula

Bantal Dakron

Kelebihan :

Ringan, mudah dicuci, relatif higienis

Kekurangan :

Mudah Kempis, kualitas menurun bila pengisian tidak rata

Eksperimen Unik, Ilmuwan Masak Sup Bison Purba 50.000 Tahun

Para ilmuwan melakukan eksperimen unik dengan memasak sup menggunakan daging bison purba yang telah terawetkan secara alami selama 50.000 tahun. Menariknya, mereka menyebut bahwa rasa sup tersebut cukup lezat.

Hewan purba itu diketahui sebagai bison legendaris bernama Blue Babe. Sekitar 50.000 tahun yang lalu, bison stepa (Bison priscus) ini hidup di wilayah Alaska pada masa Zaman Es. Ia tewas akibat serangan singa, dan ribuan tahun kemudian tubuhnya ditemukan dalam kondisi hampir utuh, membeku di lapisan es abadi Alaska. Penemuan langka ini terjadi pada tahun 1979 ketika seorang

penambang emas menemukan jasad bison yang terawetkan dengan sangat baik, kemudian menyerahkannya kepada para ilmuwan. Blue Babe pun tercatat sebagai satu-satunya bison dari zaman Pleistosen yang berhasil diangkat dari lapisan es abadi (permafrost).

Menariknya, selain dijadikan objek penelitian ilmiah, rasa ingin tahu beberapa ilmuwan mendorong mereka untuk mengolah sebagian kecil daging bison tersebut menjadi hidangan berupa sup dari leher bison berusia puluhan ribu tahun. Makan malam yang tidak biasa itu digelar di kediaman paleontolog Dale Guthrie, sosok yang memimpin proses evakuasi

Blue Babe. Awalnya, hasil analisis menunjukkan bahwa usia bison tersebut sekitar 36.000 tahun, namun penelitian terbaru memperbaruinya menjadi sekitar 50.000 tahun.

Karena tubuh Blue Babe membeku dengan sangat cepat, jaringan ototnya masih terjaga, menyerupai daging asap kering, lengkap dengan lapisan lemak dan sumsum tulang. Melihat kondisi tersebut, para peneliti pun memutuskan untuk mengolah sebagian dagingnya menjadi sup, terinspirasi dari ilmuwan Rusia yang sebelumnya pernah mencicipi hasil temuan arkeologis serupa.

“Untuk merayakan kerja Eirik Granqvist [ahli taksidermi] dengan Blue Babe, kami membuat sup daging bison untuknya dan untuk Bjorn Kurten, yang sedang memberi kuliah tamu,” tulis Guthrie dikutip IFL Science. “Sedikit bagian dari leher mumi dipotong dadu, lalu direbus bersama kaldu dan sayuran.”

Hasilnya? Menurut peneliti, daging bison itu sedikit alot dengan aroma khas Pleistosen.

“Kami makan Blue Babe untuk makan malam. Dagingnya memang sudah sangat tua, agak alot, tapi supnya punya aroma khas Pleistosen. Tak seorang pun berani melewatkannya,” kenang Guthrie.

Menurut Guthrie, mengolah daging leher berusia 50.000 tahun menjadi steak bukanlah ide yang bijak. Namun, ketika daging tersebut direbus bersama berbagai sayuran dan rempah, rasanya ternyata tidak seburuk yang dibayangkan.

Meski bumbu dan cara memasak membantu memperbaiki cita rasa, bagian perut Blue Babe tidak dapat diselamatkan karena sudah membusuk sebelum tubuhnya sempat membeku. Beruntung, bagian leher yang sempat digigit singa membeku lebih cepat, sehingga setelah 50.000 tahun berlalu dan dicairkan kembali, kondisinya masih cukup baik untuk diolah.

“Ketika dicairkan, dagingnya mengeluarkan aroma daging sapi yang khas, bercampur samar bau tanah dan sedikit jamur,” tulis Guthrie.

Pada 6 April 1984, sekitar belasan orang berkumpul untuk menyantap sup unik itu, dan kalau kamu penasaran soal efek samping makan daging berusia puluhan ribu tahun, rupanya mereka semua baik-baik saja.

“Rasanya lezat, dan tidak ada seorang pun yang sakit setelah memakannya,” kata Guthrie. (nei,ist/dya)



Bison stepa. Foto: Bernt Rostad/Wikimedia



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN | TRENGGALEK: TINA W | NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | DKI JAKARTA: FUAD HASSAN | LOMBOK BARAT: MUHAYYAN | PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **INIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Zero Waste Cooking, Cara Cerdas Memasak Tanpa Sisa

Pernahkah Anda memperhatikan seberapa banyak bahan makanan yang terbuang setelah proses memasak? Mulai dari sisa kulit sayuran, potongan bawang, hingga nasi yang mengeras, seluruh sisa bahan tersebut sering kali berakhir di tempat sampah. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tren gaya hidup ramah lingkungan semakin berkembang, salah satunya melalui penerapan konsep zero waste cooking.

Konsep ini bertujuan untuk meminimalkan bahkan menghilangkan limbah yang dihasilkan selama proses memasak, baik berupa sisa bahan makanan maupun limbah kemasan.

Langkah sederhana yang dimulai dari dapur rumah dapat memberikan dampak besar terhadap upaya mengurangi pemanasan global. Selain itu, zero waste cooking juga dapat menjadi cara kreatif untuk menciptakan menu baru yang lebih bervariasi dan bernilai guna tinggi.

Rencanakan Belanja dengan Bijak

Langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum memasak adalah berbelanja bahan makanan. Sebelum berbelanja, rencanakan terlebih dahulu menu yang akan dimasak untuk beberapa hari ke depan, kemudian susun daftar belanja secara rinci. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan memasak akan menjadi lebih efisien dan terarah.

Saat berbelanja, usahakan untuk tetap fokus pada bahan-bahan yang sudah tercantum dalam daftar belanja. Hindarilah membeli bahan makanan secara impulsif hanya karena tergiur tampilan atau promo, terutama jika belum yakin bahan tersebut akan

digunakan. Sikap selektif ini penting agar tidak ada bahan makanan yang terbuang percuma.

Selain itu, sesuaikan jumlah bahan makanan yang dibeli dengan kebutuhan dan jumlah porsi yang akan dimasak. Perencanaan belanja yang matang tidak hanya membantu menghemat pengeluaran, tetapi juga berperan dalam mengendalikan jumlah limbah dapur yang dihasilkan setelah proses memasak.

Manfaatkan Semua Bahan Makanan

Sering kali masyarakat membuang bahan makanan yang sebenarnya masih dapat dimanfaatkan dengan baik. Padahal, sebagian besar sisa bahan masakan memiliki nilai guna yang tinggi apabila diolah kembali dengan cara yang tepat. Tindakan membuang sisa makanan tanpa pertimbangan tidak hanya menimbulkan pemborosan, tetapi juga berdampak pada peningkatan jumlah limbah rumah tangga.

Beberapa contoh pemanfaatan sisa bahan makanan antara lain adalah kulit wortel yang dapat dijadikan bahan dasar kaldu, kulit jeruk yang bisa diolah menjadi teh herbal, serta sisa nasi yang dapat dimasak kembali menjadi nasi goreng.

Dengan sedikit kreativitas, berbagai sisa bahan makanan dapat diolah ulang menjadi hidangan baru yang tidak kalah bernutrisi. Oleh karena itu, sebaiknya tidak terburu-buru membuang sisa makanan, melainkan mencari cara inovatif untuk menggunakannya kembali sehingga lebih hemat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Simpan Bahan dengan Cara yang Tepat

Selain memperhatikan cara pengolahan, penting pula untuk memperhatikan metode penyimpanan bahan makanan

dengan benar. Banyak bahan makanan yang akhirnya terbuang karena disimpan dengan cara yang tidak tepat, sehingga mengalami pembusukan dan tidak layak dikonsumsi. Penyimpanan yang baik merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas bahan makanan sekaligus mengurangi limbah rumah tangga.

Dalam menyimpan sayur, buah, maupun daging, penyesuaian suhu penyimpanan perlu diperhatikan sesuai dengan karakteristik masing-masing bahan.

Penggunaan wadah kedap udara sangat disarankan agar bahan makanan tetap segar, tidak cepat rusak, serta terhindar dari kontaminasi udara dan kelembapan berlebih. Langkah sederhana ini dapat memperpanjang masa simpan bahan makanan tanpa mengurangi kualitasnya.

Sementara itu, bahan makanan kering seperti tepung, bumbu, dan minyak sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tidak lembap. Kondisi penyimpanan yang stabil akan membantu menjaga tekstur, aroma, dan kualitas bahan, sehingga tetap layak digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama.

Perhatikan Kemasan Bahan Makanan

Saat berbelanja, penting untuk memperhatikan penggunaan kemasan makanan. Penggunaan bungkus plastik sekali pakai hanya akan menambah jumlah limbah rumah tangga dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kesadaran dalam memilih kemasan menjadi langkah awal yang sederhana namun efektif dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membawa tas belanja atau wadah sendiri

dari rumah. Kebiasaan ini tidak hanya membantu mengurangi penggunaan plastik, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Selain lebih praktis, penggunaan wadah pribadi juga menjaga kebersihan serta keamanan bahan makanan yang dibeli.

Selain itu, sebaiknya menghindari kebiasaan terlalu sering memesan makanan siap saji atau pesan-antar. Sebagian besar kemasan yang digunakan untuk makanan tersebut berbahan plastik atau styrofoam yang sulit terurai.

Dengan membatasi konsumsi makanan pesan-antar, jumlah limbah kemasan dapat ditekan, sehingga berkontribusi positif terhadap upaya pengurangan sampah plastik di lingkungan.

Zero waste cooking bukan berarti tidak menghasilkan sisa sama sekali, melainkan berfokus pada upaya meminimalkan limbah makanan secara bijak. Penerapan gaya hidup ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga membantu menghemat pengeluaran rumah tangga.

Oleh karena itu, marilah kita lebih bijak dalam mengolah dan memanfaatkan bahan makanan agar tercipta pola hidup yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan menerapkan kebiasaan ini, kita tidak hanya mengurangi limbah makanan (nei,ist/dya)

Rp 300 T Kerugian ...dari hal 1

Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktek tambang ilegal timah di wilayah Bangka Belitung (Babel) telah merugikan negara hingga Rp300 triliun. Angka ini berasal dari perhitungan potensi kerugian negara dari praktik ilegal enam perusahaan smelter di wilayah tersebut.

"Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini aja; kerugian total potensi Rp300 triliun. Kerugian negara udah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan," kata Prabowo dalam tinjauan ke salah satu pabrik pemurnian di Bangka Belitung, dan penyerahan enam smelter sitaan Kejaksaan Agung ke PT Timah Tbk, Senin (6/10/2025).

Kepala negara juga menyaksikan prosesi simbolik penyerahan aset negara itu dari Jaksa Agung ST Burhanudin kepada Suahasil Nazara, Rosan Roeslani hingga Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro. Nantinya perusahaan BUMN ini yang akan mengelola enam smelter itu.

Selain enam smelter, sejumlah aset yang diserahkan ke TINS di antaranya alat berat 108 unit; peralatan tambang 195 unit; logam timah 680.687,6 kilogram; 22 bidang tanah seluas 238.848 meter persegi; satu unit gedung mess. Adapun, potensi pendapatan tahunan jika seluruh aset ini dioperasikan mencapai Rp4,6 triliun.

Saat memberikan keterangan pers, Prabowo mengatakan enam smelter itu merupakan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melakukan pelanggaran hukum. "Ini tambang tanpa izin di kawasan PT Timah. Jadi yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan yang sudah menyita enam smelter," katanya.

Prabowo juga mengatakan nilai dari enam smelter yang disita itu mencapai Rp 6-7 triliun. Tak hanya aset pabrik, terdapat pula barang sitaan hasil tambang berupa tanah jarang hingga ingot timah (bongkahan).

Sementara itu, kerugian negara tersebut terungkap saat Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi tata kelola niaga pada wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Dalam kasus tersebut, korps Adhyaksa menetapkan lima perusahaan atau korporasi smelter di Bangka Belitung sebagai tersangka. Lima perusahaan tersebut antara lain, PT Refined Bangka Tin (RBT); PT Stanindo Inti Perkasa (SIP); PT Sariwiguna Bina Sentosa (SB); CV Venus Inti Perkasa (VIP); dan PT Tinindo Inter Nusa (TIN).

Berdasarkan catatan Kejaksaan Agung, PT Timah Tbk memiliki wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mencakup area darat dan laut di wilayah Bangka, Belitung, Pulau Kundur, Kepulauan Riau, dan

sebagian Provinsi Riau dengan total luas wilayah IUP darat sekitar 288.000 hektare. Namun, tingkat produksi PT Timah Tbk tidak sebanding dengan produksi smelter swasta yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil penyidikan, salah satu penyebab rendahnya produksi PT Timah Tbk adalah banyaknya penambangan ilegal di dalam wilayah IUP PT Timah.

Penyidik Kejaksaan kemudian meminta ahli lingkungan hidup serta badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara dalam kasus tersebut. Keduanya pun menetapkan kerugian dalam kasus tersebut mencapai Rp300,3 triliun; yang terdiri dari kerusakan alam sebesar Rp271 triliun; dan Rp29 triliun dari kerugian PT Timah Tbk.

Sedangkan dalam perkembangannya, tim gabungan menemukan satu perusahaan smelter yang juga terlibat dalam praktik tambang timah ilegal di Bangka Belitung yaitu PT Menara Cipta Mulia (MCM).

Dalam kasus ini, kejaksaan berdasarkan bantuan perhitungan ahli lingkungan hidup serta badan pengawasan keuangan dan pembangunan menetapkan dugaan kerugian negara dari korupsi di IUP PT Timah Tbk mencapai Rp300,3 triliun. Sebesar Rp271 triliun di antaranya adalah kerusakan alam akibat tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung.

Sedangkan sisanya, diduga dinikmati perorangan termasuk 22 tersangka dalam kasus tersebut. Misalnya, Harvey Moeis dan Helena Lim yang dalam dakwaan diduga menikmati Rp420 miliar dari korupsi Timah.

Secara lebih detail, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Andriansyah mengatakan, PT RBT menjadi tersangka dan akan dijera ganti rugi kerusakan lingkungan sebesar Rp38,5 triliun.

Kemudian, PT SB akan diminta tanggung jawab sebesar Rp23,6 triliun; PT SIP sebesar Rp24 triliun; CV VIP sebesar Rp42 triliun; serta PT TIN sebesar Rp23 triliun.

Menurut dia, total ganti rugi kerusakan alam dari lima perusahaan tersebut memang baru mencapai Rp151,1 triliun. Atau, masih tersisa total kerugian negara dari rusaknya ekosistem di Bangka Belitung mencapai Rp119,9 triliun.

"Sisanya dari Rp271 triliun yang telah diputuskan hakim dan jadi kerugian negara sedang dihitung BPKP siapa yang bertanggung jawab akan kita tindak lanjuti dan disampaikan ke publik," kata Febrie.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa dalam kasus tersebut terdapat 3 klaster perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara yakni kerja sama sewa alat atau smelter dari pihak swasta dengan PT

Timah, transaksi timah dari PT Timah yang dilakukan pihak swasta, serta kerugian lingkungan hidup atas kerusakan ekosistem.

Menurut dia, Jaksa telah sepakat bahwa kerugian kerusakan lingkungan hidup merupakan kerugian negara dalam kualifikasi tindak pidana korupsi.

Dengan begitu, penyidik mengumpulkan bukti-bukti untuk menjerat korporasi terkait yang turut andil menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut.

"Hasil ekspose Jaksa Agung memutuskan kerugian kerusakan lingkungan hidup akan kita bebaskan ke perusahaan-perusahaan sesuai kerusakan yang ditimbulkan masing-masing perusahaan dan itu sudah ada dalam putusan pengadilan," tutur Febrie.

Lebih lanjut, menurut kepala negara, dari enam perusahaan yang dikelola para pelaku korupsi itu mampu menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. "Kerugian negara sudah berjalan Rp 300 triliun. Ini kita hentikan," kata Prabowo.

Untuk itu, Prabowo berpesan kepada aparat penegak hukum untuk terus membasmi tambang timah ilegal. Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah serius dalam membasmi penyelundupan hingga tambang ilegal yang merugikan negara.

Salah satu kasus yang disinggung adalah korupsi tata niaga tambang timah yang berada di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 - 2022.

"Jadi ini suatu bukti bahwa pemerintah serius. Kita sudah bertekad untuk membasmi penyelundupan, membasmi ilegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kita tegakkan dan kita tidak perlu siapa-siapa yang ada di sini," kata Prabowo.

Prabowo mengapresiasi seluruh seluruh pejabat di Kejaksaan Agung, TNI, Bakamla, Bea Cukai dan semua pihak yang terlibat menangani dengan cepat, korupsi tata kelola tambang timah yang merugikan negara mencapai Rp 300 triliun itu.

"Ini prestasi yang membanggakan sehingga tolong diteruskan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Bea Cukai, Bakamla, teruskan. Kita selamatkan kekayaan negara untuk rakyat kita," kata Prabowo. Ke depan Prabowo berharap ada ratusan triliun aset negara yang bisa diselamatkan dari para koruptor.

Di satu sisi, Presiden Prabowo juga mengaku menemukan kandungan logam tanah jarang (LTI) monasit sekitar 40.000 ton pada rangkaian penertiban tambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS).

Menurut hitung-hitungan Prabowo, 1 ton monasit memiliki nilai pasar sekitar US\$200.000 atau sekitar Rp3,31 miliar (asumsi kurs Rp16.585 per dolar AS).

Dengan demikian, potensi

pendapatan negara dari 40.000 ton monasit yang diselamatkan dari tambang ilegal itu mencapai sekitar Rp132,68 triliun.

"Total ditemukan puluhan ribu, mendekati 40.000 ton (monasit), kita bisa bayangkan kerugian negara," kata Prabowo kepada awak media saat penyerahan aset rampasan negara di smelter PT Tinindo Internusa, Kecamatan Bukitintan, Kota Pangkal Pinang, Senin (6/10/2025).

Monasit merupakan salah satu mineral LTI iktan yang berasal dari kegiatan penambangan bijih timah. LTI seperti monasit digunakan sebagai bahan baku produk elektronik seperti televisi, laptop, telepon genggam, dan sebagainya.

Monasit juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan solar cell atau panel surya, baterai isi ulang, dan fuel cell atau sel bahan bakar.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mengharapkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) bisa dipercepat. UU tersebut telah diundangkan sejak 19 Maret 2025, namun hingga Oktober ini, regulasi turunannya belum juga diterbitkan.

Padaحال, Ratna mengingatkan, Pasal 174 ayat (1) UU Minerba dengan tegas menyebutkan bahwa seluruh peraturan pelaksana wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pengundangan. Artinya, batas waktu penyelesaian PP jatuh pada September 2025.

Menurut Ratna, keterlambatan ini tidak bisa dianggap sekadar persoalan administratif. Ia menilai dampaknya langsung terasa, terutama terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha, potensi penerimaan negara, dan efektivitas implementasi kebijakan di sektor pertambangan.

"UU Minerba 2025 sudah memberi arah jelas untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Namun tanpa PP pelaksana, seluruh amanat dalam Pasal 17 tentang penempatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak bisa dijalankan secara efektif," kata Ratna dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/10/2025).

"Investor menunda ekspansi, pemerintah daerah kebingungan mengambil langkah, dan masyarakat lokal kembali menjadi korban ketidakpastian kebijakan. Ini situasi yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama," jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Ratna pun turut menyoroti dampak nyata keterlambatan regulasi PP Minerba terhadap daerah penghasil tambang. Ia menyebut, hal ini membuat pemerintah daerah (Pemda) kehilangan dasar hukum untuk menata wilayah pertambangan rakyat, dan pelaku usaha kecil kesulitan mengakses perizinan yang semestinya terbuka bagi mereka. (han,rls,ist/lut)



DPRD JATIM SETUJUI RAPERDA TRANSFORMASI JAMKRIDA JADI PERSERODA

SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggelar sidang paripurna dengan agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur, Senin (06/10/2025).

Raperda ini disahkan sebagai landasan hukum transformasi PT Jamkrida Jatim, dari semula berbentuk Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Ro'uf, menegaskan bahwa pengesahan Raperda ini memiliki arti penting bagi tata kelola BUMD di Jawa Timur.

"Hari ini kita melakukan Penandatanganan Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Perda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pinjaman Kredit Daerah Jawa Timur. Raperda ini sangat penting karena bertujuan untuk menyesuaikan bentuk hukum PT Jamkrida Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah," ujar Musyafak.

Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menekankan pentingnya memastikan agar transformasi kelembagaan Jamkrida Jatim tidak hanya berhenti pada penyesuaian status hukum.

Salim Azhar, Juru Bicara F-PKB, menegaskan bahwa perubahan menjadi Perseroda memang sejalan dengan amanat PP Nomor 54 Tahun 2017, namun harus dipastikan berdampak nyata bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya sektor usaha kecil dan menengah.

"Fraksi PKB memberikan apresiasi atas tuntasnya pembahasan Raperda ini. Raperda ini sangat penting karena bertujuan menyesuaikan bentuk hukum PT Jamkrida Jatim menjadi Perusahaan Perseroan Daerah



Sidang paripurna DPRD Jatim agenda Penandatanganan Persetujuan Bersama Penetapan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur, Senin (06/10/2025). (humas DPRD Jatim)

(Perseroda), sejalan dengan amanat PP Nomor 54 Tahun 2017," ujarnya.

Salim mengingatkan, meski Perseroda memiliki orientasi mencari keuntungan, Jamkrida Jatim sebagai BUMD tetap wajib mengedepankan pelayanan publik.

"Meskipun Perseroda memiliki orientasi profit (mencari keuntungan), sebagai BUMD PT Jamkrida Jatim wajib menyeimbangkan fungsi tersebut dengan orientasi pelayanan publik (public service oriented)," tegasnya.

Ia menilai keseimbangan ini penting agar Jamkrida Jatim tidak sekadar mengejar profitabilitas, tetapi juga memperluas akses pembiayaan masyarakat kecil.

"F-PKB mendesak Gubernur memastikan bahwa kegiatan usaha PT Jamkrida Jatim benar-benar memprioritaskan penjaminan kredit bagi UMKM, kelompok usaha pertanian, dan koperasi, mengingat jumlah UMKM di Jawa Timur sangat besar," tambahnya.

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Jatim mencatat, jumlah UMKM di provinsi ini mencapai lebih dari 9,7 juta unit, menjadikannya tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.

Salim menegaskan, jika Jamkrida Jatim benar-benar memprioritaskan UMKM, dampaknya akan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Senada dengan hal tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa Raperda Jamkrida sangat strategis bagi penguatan UMKM.

Juru Bicara Fraksi PKS, Hj. Lilik Hendarwati, menyebut Raperda ini sebagai instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan inklusif bagi koperasi dan UMKM.

"Kehadiran Raperda ini sangat urgen dan strategis untuk kepentingan pengembangan UMKM melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pelaku usaha. Termasuk di dalamnya adalah mendukung peningkatan akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha, khususnya koperasi dan UMKM," tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian Jatim. Data Dinas Koperasi dan UKM Jatim mencatat, jumlah UMKM hampir mencapai 10 juta unit usaha.

"UMKM adalah sektor unggulan yang terbukti mampu bertahan di tengah situasi sulit, termasuk saat pandemi lalu. Maka kebijakan afirmasi terhadap sektor unggulan Jawa Timur tersebut perlu terus dilakukan agar UMKM dapat berkembang, berdaya, dan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," pungkash Lilik.

Adapun Fraksi PPP-PSI menyoroti aspek tata kelola dan budaya kerja dalam transformasi Jamkrida Jatim.

Zeiniye, Juru Bicara Fraksi PPP-PSI,

menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD.

"Harapan kami, Fraksi PPP-PSI, atas prinsip akuntabilitas, maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Perseroda Jamkrida Jatim, harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar," ujarnya.

Ia menekankan bahwa setiap kebijakan harus terukur, selaras dengan visi perusahaan, serta memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

"Pengelolaan BUMD tidak boleh asal-asalan. Harus benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya," tegasnya.

Menurut Zeiniye, kunci keberhasilan transformasi adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas manajemen.

PPP-PSI juga menilai bentuk hukum Perseroda memberi fleksibilitas lebih besar bagi Jamkrida Jatim, baik dalam mengelola modal, aset, maupun SDM.

"Fraksi PPP-PSI sependapat atas bentuk hukum Perseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasikan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal, pengelolaan aset, serta pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni)," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi status hukum harus diikuti reformasi etos kerja.

"Di sisi lain, kekurangan terbesar bentuk hukum Perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi, dan etos kerja sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah. Jelas ini akan memakan waktu lebih lama, maka hal ini harus menjadi perhatian khusus oleh jajaran Direksi maupun Komisaris," pungkashnya. (adv,pra/lut)